

DIPLOMASI KEMANUSIAAN TURKI MELALUI PENDEKATAN AKSI KEMANUSIAAN DI AFGHANISTAN DAN SOMALIA

TURKISH HUMANITARIAN DIPLOMACY THROUGH HUMANITARIAN ACTION APPROACH IN AFGHANISTAN AND SOMALIA

Regi Rahmawati¹, Dina Dina²

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari Bandung
Email: reghirahmawati22@gmail.com, dina.shusein@gmail.com

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir Turki telah menjadikan Diplomasi Kemanusiaan (HD) sebagai elemen penting dari kebijakan luar negerinya. Penelitian ini menganalisis Diplomasi Kemanusiaan Turki sebagai konsepsi peran dan kinerja peran dengan teori peran Breuning dengan berfokus pada dua kasus, Somalia dan Afghanistan, sebagai dua kasus terpenting Diplomasi Kemanusiaan Turki. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur melalui analisis buku, surat kabar, dan publikasi dari instansi terkait. Hasilnya, dapat dikatakan bahwa Diplomasi Kemanusiaan sebagai kebijakan luar negeri telah memberi Turki fleksibilitas dan ambiguitas yang cukup untuk menyatukan kemanusiaan dengan kepentingan. Pada saat yang sama, kepentingan kebijakan luar negeri Turki mulai menjadi lebih sah dan diterima dengan mengaitkannya dengan norma-norma yang dihormati secara luas. Terakhir, HD juga membantu Turki untuk mengkonsolidasikan identitas negara internasionalnya serta identitas domestiknya.

Kata Kunci: Diplomasi Kemanusiaan, Konsepsi Peran Nasional, Turki, Afghanistan, Somalia

ABSTRACT

In recent years Turkey has made Humanitarian Diplomacy (HD) an important element of its foreign policy. This study analyzes Turkish Humanitarian Diplomacy as a role conception and role performance with Breuning's role theory by focusing on two cases, Somalia and Afghanistan, as the two most important cases of Turkish Humanitarian Diplomacy. This study uses a literature study method through analysis of books, newspapers, and publications from related agencies. As a result, it can be said that Humanitarian Diplomacy as a foreign policy has provided Turkey with sufficient flexibility and ambiguity to unite humanity with interests. At the same time, Turkey's foreign policy interests are starting to become more legitimate and accepted by linking them to widely respected norms. Lastly, HD also helps Türkiye to consolidate its international state identity as well as its domestic identity.

Keywords: Humanitarian Diplomacy, National Role Conception, Turkey, Afghanistan, Somalia

A. PENDAHULUAN

Turki telah menempatkan dirinya sebagai aktor kemanusiaan internasional dan terlibat di beberapa negara yang terkena dampak konflik. Bantuan kemanusiaan dan pembangunan Turki terus meningkat, terutama sejak 2012 (TİKA, 2019). Hal ini didorong oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa sejak 2002, yang menjadikan Diplomasi Kemanusiaan sebagai elemen utama kebijakan luar negerinya. Mantan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoğlu pertama kali menggunakan istilah ini pada Januari 2013. Sejak itu, Presiden Erdoğan dan elit kebijakan luar negeri AKP terus menggunakan istilah 'humanitarian foreign policy'. Implementasi kebijakan ini juga didukung oleh lembaga bantuan seperti AFAD dan TİKA.

Pada tahun 2014, Turki menjadi anggota UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), dan pada tahun 2016, Turki menjadi tuan rumah KTT Kemanusiaan Dunia PBB yang pertama (OCHA, 2013). Menteri Luar Negeri Mevlut Cavuşoğlu pada tahun 2021 kembali menegaskan visi kebijakan luar negeri Turki sebagai 'Enterprising and Humanitarian Foreign Policy' (Daily Sabah, 2021). Diplomasi Kemanusiaan dikembangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan negosiasi oleh NGO kemanusiaan di lingkungan konflik (Régnier, 2011). Beberapa pemerintah juga menggunakan konsep ini dalam kebijakan luar negeri mereka, termasuk Turki (De Lauri, 2018).

Penggunaan Diplomasi Kemanusiaan sebagai kebijakan luar negeri oleh negara telah menimbulkan ketegangan dan ketidakjelasan pada konsep tersebut (Lauri, 2016a). Analisis terhadap Diplomasi Kemanusiaan Turki menarik karena membedakan antara traditional donors dan emerging donors. Kebijakan Turki memiliki kesamaan dan perbedaan dengan model liberal peacebuilding dan state-building dari traditional donors. Turki menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan kemerdekaan nasional serta bekerja dengan aktor lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus (Kavakli, 2018).

Turki mengklaim bahwa pendekatannya terhadap pembangunan dan bantuan kemanusiaan lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan donor tradisional Barat yang cenderung memaksakan model dan solusi mereka sendiri tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Meskipun ada perbedaan, potensi kolaborasi antara Turki dan donor tradisional Barat tetap ada untuk meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, meskipun Turki dianggap sebagai emerging donor, ia memiliki perbedaan signifikan dari negara emerging lainnya.

Salah satu perbedaan utama adalah sejarah panjang Turki dalam memberikan bantuan kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Pengalaman ini memberi Turki perspektif unik tentang tantangan yang dihadapi negara-negara yang terkena dampak krisis kemanusiaan dan membentuk pendekatannya terhadap bantuan kemanusiaan. Sementara emerging donors lain seperti India atau China mempertahankan norma non-intervensi, Turki lebih bersikap intervensionis dalam pendekatannya terhadap Diplomasi Kemanusiaan dan pembangunan negara.

Diplomasi Kemanusiaan sebagai kebijakan luar negeri menciptakan ambiguitas antara norma dan kepentingan serta antara konsep dan aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontradiksi dan ketidakkonsistenan dalam Diplomasi Kemanusiaan Turki menggunakan perspektif teori peran NRC (National Role Conceptions) Breunig.

B. TINJAUAN TEORITIS

Hubungan internasional adalah bidang studi kompleks yang mengkaji hubungan antara negara, organisasi internasional, NGO, perusahaan multinasional, dan individu (Brown & Ainley, 2005). Bidang ini mencakup isu-isu seperti pemerintahan global, diplomasi, keamanan internasional, ekonomi politik internasional, dan hak asasi manusia. Tujuannya adalah memahami bagaimana negara dan aktor lain berinteraksi di arena internasional dan dampaknya pada politik, ekonomi, dan masyarakat global. Analisis ini menggunakan

berbagai teori seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, dan teori kritis untuk mengembangkan kebijakan dan strategi mengatasi tantangan global. Hubungan internasional dan diplomasi kemanusiaan terkait erat dalam menangani isu-isu global seperti tata kelola, resolusi konflik, dan intervensi kemanusiaan (Roberts, 1999). Diplomasi kemanusiaan berfokus pada penggunaan diplomasi untuk tujuan kemanusiaan, seperti melindungi populasi rentan dalam konflik atau bencana (De Lauri, 2018).

Diplomasi kemanusiaan menggabungkan prinsip kemanusiaan dengan praktik diplomasi untuk mempromosikan dan melindungi tujuan kemanusiaan. Ini melibatkan negosiasi dan advokasi untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan melindungi warga sipil dalam situasi krisis (Rahmawati et al., 2021). Prinsip utama diplomasi kemanusiaan termasuk kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi, serta melibatkan berbagai aktor dari pemerintah hingga masyarakat sipil (Harroff-Tavel, 2005; Turunen, 2022). Tujuan diplomasi kemanusiaan adalah mempromosikan dan melindungi hak dan martabat orang yang terkena dampak krisis, serta menggunakan alat seperti advokasi, negosiasi, dan mediasi untuk mencapai tujuan ini. Pemahaman konteks politik dan kemanusiaan yang mendalam serta keterampilan komunikasi yang kuat diperlukan untuk diplomasi kemanusiaan yang efektif (Harroff-Tavel, 2005; Turunen, 2022).

Konstruktivisme muncul pada 1980-an sebagai alternatif antara teori-teori positivis dan post-positivis dalam hubungan internasional, berfokus pada ide sebagai pendorong tindakan aktor dalam sistem internasional (Wendt, 1992: 394). Tiga asumsi utama Wendt adalah: (1) aktor adalah unit analisis utama dalam teori politik internasional, (2) struktur utama dalam sistem bersifat intersubjektif, bukan material, (3) identitas dan kepentingan negara dibangun oleh struktur sosial ini (Wendt, 1999: 35). Ide memberi makna pada materi dan menjadi inti dari kepentingan dan perilaku dalam interaksi sosial. Kausalitas antara identitas dan kepentingan menciptakan motif yang mengarahkan identitas, dengan kepentingan menjadi pendorong utama bagi pembentukan identitas. Identitas mengacu pada keadaan ontologis aktor, sementara kepentingan mengacu pada apa yang diinginkan aktor, menjadikan kepentingan sebagai motivasi yang menjelaskan perilaku (Wendt, 1999: 231-6).

Teori peran dalam hubungan internasional, diperkenalkan oleh K.J. Holsti pada tahun 1970, menekankan pentingnya persepsi, nilai, dan sikap pemangku kebijakan (Breuning, 2011). NRC dikembangkan lebih lanjut oleh Thies (2014) menjadi empat kategori besar: *autonomous*, *dependant*, *mendukung dominant powers*, atau sebaliknya. NRC menganalisa secara *cross levels*, baik individu, negara, maupun sistem, dan mengukur relativitas antara agen dan struktur dalam kebijakan luar negeri (Breuning, 2011). Konsepsi peran nasional (NRC) adalah kerangka kerja yang membantu memahami bagaimana konsep diri dan persepsi negara tentang tempat mereka di dunia dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan perilaku internasional mereka. Dalam pengertian ini, NRC bisa menjadi alat yang berguna untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku negara dalam teori hubungan internasional yang lebih luas seperti realisme, liberalisme, atau konstruktivisme.

Konsepsi peran nasional (NRC) dalam teori *National Role Conceptions* (NRC), Breuning memberikan dua komponen yaitu *Role Conceptions & Role Performance*. *Role Conceptions* atau konsepsi peran mengacu pada persepsi diri suatu negara tentang identitasnya dan perannya dalam sistem internasional. Ini termasuk keyakinan negara tentang kepentingan, nilai, tanggung jawab, dan kewajiban nasionalnya terhadap negara lain dan komunitas internasional. *Role Performance* atau kinerja peran, di sisi lain, merujuk pada perilaku kebijakan luar negeri aktual yang ditunjukkan oleh suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain dan organisasi internasional. Teori NRC berpendapat bahwa konsepsi peran negara dan kinerja peran terkait erat, dan bahwa perilaku negara dalam sistem internasional dibentuk oleh persepsi dirinya tentang identitas dan perannya. Secara keseluruhan, teori NRC menekankan pentingnya persepsi diri suatu negara dan hubungannya dengan perilakunya dalam sistem internasional, menyoroti cara keyakinan suatu negara tentang identitas dan perannya dapat memengaruhi pilihan kebijakan luar negerinya dan interaksinya dengan negara lain.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif-interpretatif untuk mendalami fenomena sosial yang kompleks. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, termasuk laporan pemerintah, pernyataan publik, dan wawancara sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis tematik, fenomenologis interpretatif, dan naratif, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data yang dikumpulkan. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses dan aktor politik, serta memberikan wawasan penting ke dalam konteks sosial dan budaya politik yang terkait dengan Diplomasi Kemanusiaan Turki.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diplomasi Kemanusiaan sebagai Konsepsi peran: kerangka kerja konseptual

Konsepsi peran negara sebagai gagasan tentang tempat yang tepat dalam hubungan internasional (Holsti, 1970) adalah manifestasi dari identitas dan kepentingan mereka. Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsepsi peran kebijakan luar negeri adalah arena di mana negara dapat membangun identitasnya sebagai '*aktor yang berbelas kasih kemanusiaan*' sekaligus mengejar kepentingannya. Di satu sisi, konsepsi peran Diplomasi Kemanusiaan, terlepas dari ketegangan yang terus tertanam antara kedua tujuan ini (Lauri, 2016b) memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan karena menggabungkan 'kemanusiaan' dengan 'diplomasi.' Masalah ini menjadi relevan dalam menghubungkan konsepsi peran nasional dan kebijakan luar negeri. *Seperti halnya teori konstruktivisme, yang juga bergantung pada wacana, teori peran menghadapi tantangan dalam menghubungkan konsepsi peran nasional dengan praktik kebijakan luar negeri.* Seperti pendapat (Breuning, 1995) hal ini sangat relevan dalam bidang isu bantuan luar negeri, karena secara umum diklaim bahwa sementara kata-kata tersebut menekankan kemanusiaan, tetapi perbuatan tersebut mempraktikkan kepentingan nasional. Dengan demikian, Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsepsi peran yang melibatkan identitas dan kepentingan menyediakan fungsi penghubung bagi negara. Sebuah analisis mendalam tentang Diplomasi Kemanusiaan dalam praktiknya dalam kasus Turki mengungkapkan bagaimana elemen-elemen yang tampaknya kontradiktif dalam Diplomasi Kemanusiaan ini bekerja dalam praktiknya dan ketegangan yang terus berlanjut di antara mereka.

Untuk mengungkap ketegangan yang melekat ini dan bagaimana hal itu ditangani dalam HD sebagai konsepsi peran, pertama-tama, kita perlu melihat sumber-sumber peran nasional. Dalam literatur tentang teori peran Breuning, sementara beberapa lebih fokus pada sumber material, yang lain kurang lebih mengidentifikasi norma dan identitas sebagai sumber utama konsepsi peran nasional. Namun, (Breuning, 2011) berpendapat bahwa faktor ideasional, seperti persepsi aktor tentang identitas dan warisan budaya mereka¹, dan faktor material, seperti kemampuan dan peluang aktor untuk bertindak, mengarah pada konsepsi peran nasional yang ditentukan oleh pembuat keputusan. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada kinerja peran, yaitu perilaku kebijakan luar negeri (Breuning, 2011, p. 26). Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja Breuning untuk membahas HD sebagai konsepsi peran nasional dan kinerja peran Turki. Dikatakan bahwa konsepsi peran nasional Turki sebagai aktor kemanusiaan dan definisi kebijakan luar negerinya sebagai Diplomasi Kemanusiaan memiliki sumber ide dan material. Mengadopsi konsep ambigu ini juga membantu Turki menghubungkan konsepsi peran nasionalnya dengan kinerjanya di negara-negara yang terkena dampak konflik.

Aspek relasional peran nasional telah ditekankan dalam perdebatan terkait. Dengan demikian, peran didefinisikan sebagai 'gagasan aktor tentang siapa mereka, ingin menjadi

¹ Jadi Turki merupakan negara islam jadi mereka berpikir membantu sesama manusia adalah hal yang universal dan harus di tanamkan.

apa mereka terhadap orang lain, dan bagaimana mereka, oleh karena itu, harus berinteraksi dalam hubungan sosial (internasional)' (Harnisch, 2011, pp. 1–2). Dalam kasus Turki, Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsepsi peran nasional memiliki dua aspek relasional. Di satu sisi, pemerintah Turki memanfaatkan konsepsi peran Diplomasi Kemanusiaan untuk mendapatkan status di kancah internasional. Di sisi lain, Turki telah menggunakan Diplomasi Kemanusiaan untuk secara diskursif membedakan dirinya dari 'yang lain' dan membangun identitasnya sendiri, yang menurut elit politik Turki adalah 'asli'. Hal ini terkait dengan aspek relasional lain dari teori peran, yang berfokus pada ranah domestik (Cantir & Kaarbo, 2016). Ketika elit politik memberikan narasi untuk menjustifikasi konsepsi peran di dalam negeri, konsepsi peran nasional dan kinerja kebijakan luar negeri selanjutnya menjadi bagian dari debat dan kontestasi domestik. Selain itu, Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsepsi peran dapat menjadi bagian integral dari politik domestik melalui konstruksi identitas serta hubungan negara-masyarakat dan transformasi masyarakat. Studi ini didasarkan pada asumsi bahwa siapa yang berkuasa membuat perbedaan. Cara Diplomasi Kemanusiaan didefinisikan dan bantuan serta intervensi kemanusiaan Turki dirancang dan diimplementasikan sejalan dengan Turki dan pandangan dunianya.

Sebagai konsepsi dan kinerja peran nasional, Diplomasi Kemanusiaan sangat penting bagi upaya Turki untuk membingkai ulang identitasnya di dalam negeri. Elit politik menampilkan peran Diplomasi Kemanusiaan sebagai elemen intrinsik dari identitas Turki berdasarkan Islam dan tradisi Ottoman yang dibangun.

2. Sumber Ide dan Material Peran Diplomasi Kemanusiaan Turki

Sumber Diplomasi Kemanusiaan Turki terletak pada aspek ideasional dan material. Idealnya, persepsi Turki tentang identitasnya dan warisan budaya/sejarahnya telah digunakan untuk mengadopsi Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsep peran nasional. Struktur normatif ini melegitimasi kerangka Diplomasi Kemanusiaan dan tindakan-tindakan selanjutnya. Elit politik dan pejabat yang memimpin organisasi bantuan sering menyebut 'hati nurani', 'menghargai kehidupan manusia', dan 'membantu yang tertindas dan korban' sebagai pendorong Diplomasi Kemanusiaan Turki. Dengan demikian, Turki telah mencap dirinya sebagai aktor yang 'menganjurkan keadilan, hati nurani, dan keadilan' (TİKA, 2017). Judul laporan tahunan TİKA (2017) adalah 'Turki: Hati Nurani Dunia' (TİKA, 2017). Nilai-nilai ini diklaim berasal dari identitas dan warisan sejarah Turki (Berbagai laporan TİKA dan AFAD). Meski tidak selalu diungkapkan secara terbuka, namun rujukan identitas mengacu pada identitas Islam. Erdoğan, misalnya, berbicara pada upacara yang diadakan untuk minggu mevlid-i nebi1 (mawlid-al nabi), mengatakan bahwa 'alasan mengapa kami peduli dengan masalah orang yang ribuan, sepuluh ribu kilometer jauhnya dari kami adalah Islam sebagai penyebut yang sama di antara kita' (TRT Haber 8 November 2019). Akibat wajar dari identitas ini adalah masa lalu Ottoman; dalam ideologi Diplomasi Kemanusiaan, keduanya terkait. Kekaisaran Ottoman dipandang sebagai lambang negara Islam, karena memerintah wilayah yang luas dan ada selama sekitar sembilan abad. Dengan demikian, Turki berpendapat bahwa selain nilai-nilai yang berasal dari identitas Islam, 'masa lalu Turki yang mengakar' memberi Turki tanggung jawab terhadap orang-orang di wilayah yang pernah dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Dalam hal ini, (Davutoğlu, 2013, p. 868) menyatakan bahwa 'kami bertindak tanpa membeda-bedakan antara warga negara kami dan orang-orang yang berbagi sejarah yang sama dengan kami.' Dengan demikian, Turki menghubungkan Diplomasi Kemanusiaannya dengan identitas Muslim Turki dan masa lalu Ottoman, seperti inilah elemen inti dari konsep peran yang hampir pasti membuat Turki aktif di Diplomasi Kemanusiaan. Karena unsur-unsur ideasional ini sangat intrinsik dengan identitas dan ideologinya, terlepas dari 'pergantian Realis' dalam kebijakan luar negeri Turki sejak 2016 (Altunışık, 2020), penekanan pada kemanusiaan sebagai identitas dan

wacana terkait terus berlanjut. Padahal, Diplomasi Kemanusiaan, sebagai konsepsi peran nasional yang memungkinkan mengejar kepentingan selain menitikberatkan pada kemanusiaan, tidak bertentangan dengan meningkatnya penekanan pada realpolitik. Selain itu, pembingkai Diplomasi Kemanusiaan seperti itu dan terutama berfokus pada 'geografi Islam' dan 'tanggung jawab' Turki memungkinkan menjadi lebih intervensionis dibandingkan dengan 'emerging power' lainnya yang kurang bersemangat untuk menantang kedaulatan dan norma non-intervensi.

Konsepsi norma bersifat relasional karena mencerminkan bagaimana negara memposisikan diri dalam hubungan sosial. Dalam setiap krisis kemanusiaan, elit politik, terutama Presiden Erdoğan, menyandingkan sikap Turki dengan sikap 'pihak lain' (Langan, 2017). Di sini, yang lain terutama adalah 'orang Eropa,' 'Barat,' dan 'negara-negara maju.' Namun, baru-baru ini, 'para pemimpin dunia Arab' juga dimaksudkan untuk mengkritik kelambanan mereka dalam 'berurusan dengan penderitaan sesama Arab dan Muslim.' Misalnya, menyeru negara-negara kaya minyak, Presiden Erdogan berkata, 'Jika negara-negara Muslim yang kaya minyak menentukan dan memberikan sedekah (zakat) mereka ke negara-negara miskin, tidak akan ada orang miskin tertinggal di seluruh dunia. Apakah mereka melakukannya? Tidak, mereka tidak' (Turkey Tribune 11 April 2018).

Elit politik juga sering merujuk pada 'kegagalan Barat' dalam menghadapi krisis kemanusiaan saat ini, terutama dalam konteks Suriah dan Somalia, dan pada isu penindasan Muslim Arakan di Myanmar. Pada tahun 2015, Erdoğan, berbicara di Strasburg kepada audiens Turki yang tinggal di Eropa, mengemukakan bahwa Turki telah mengajarkan Eropa dan dunia 'pelajaran tentang kemanusiaan' dengan menampung, pada saat itu, dua juta pengungsi dari Suriah (BBC News, 5 Oktober 2015). Di Somalia dan tempat-tempat lain di Afrika, wacana tersebut juga secara umum menyandingkan bantuan Turki dengan keterlibatan 'kekaisaran Eropa' dengan masa lalu kolonialnya (Langan, 2017). Dalam semua konteks tersebut, Turki bertujuan untuk membedakan dirinya dari yang lain dengan membingkai dirinya sebagai aktor yang peduli. Berbicara dalam menanggapi meningkatnya kekerasan terhadap Muslim di Arakan pada tahun 2017, Erdogan berkata, 'sayangnya, dunia buta dan tuli dalam menghadapi perkembangan di Myanmar. Ia tidak melihat dan mendengar.' (Deutsche Welle Turki 28 Agustus 2017). Demikian pula saat mengadakan konferensi pers dengan presiden Somalia Mohamed Farmaajo, Erdogan menyatakan bahwa,

Empat belas juta orang, terutama wanita dan anak-anak, menderita kelaparan di seluruh Afrika. Banyak negara barat maju bermain burung unta dalam menghadapi tragedi kemanusiaan tersebut. Di sisi lain, kami melakukan segala daya kami melalui Bulan Sabit Merah Turki dan Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TİKA) untuk mengirimkan bantuan (situs web Kepresidenan 26 April 2017, penekanan ditambahkan).

Dengan demikian, upaya untuk memposisikan dirinya secara internasional sebagai '**aktor kemanusiaan yang lebih**' dari yang lain telah digunakan untuk mendefinisikan identitas internasional Turki melalui konstruksi 'yang lain'. Selain itu, konsepsi peran Diplomasi Kemanusiaan yang menekankan aktor kemanusiaan Turki secara internasional telah digunakan sebagai simbol status. Seperti yang dikemukakan Barnett (2011, 20), kemanusiaan dan kasih sayang telah menjadi simbol status dalam politik global. Ini bahkan lebih relevan dengan apa yang disebut '**kekuatan yang meningkat**', karena Diplomasi Kemanusiaan dapat dilihat sebagai salah satu praktik identifikasi diri yang menempatkan negara-negara ini mendekati status negara maju. (Langan, 2017) membuat argumen serupa bahwa dalam kasus Turki, penundaan proses akses UE yang dimulai pada tahun 2005 telah memainkan peran penting dalam pencarian aktivisme Ankara di wilayah lain di dunia, termasuk sebagai aktor kemanusiaan. Pada saat yang sama, peran semacam itu telah memberikan kesempatan untuk mengadukan UE, yang telah menampilkan dirinya sebagai kekuatan normatif.

Selain sumber-sumber ideasional, kita juga dapat menemukan sumber-sumber material dan bagaimana mereka dipersepsikan oleh elit politik dalam membangun konsepsi peran

nasional. Dalam kasus Turki, karakteristik material seperti peningkatan kemampuan militer dan kinerja ekonomi hingga saat ini berperan dalam tumbuhnya paham kemanusiaan dan pengadopsian Diplomasi Kemanusiaan sebagai kebijakan luar negeri. Seperti yang dijelaskan oleh (Hatipoglu & Palmer, 2016, p. 246), 'sekali kekuatan menengah melebihi ambang tertentu dalam kemampuannya,' alat-alat seperti bantuan asing 'tiba-tiba masuk ke perangkat kebijakan luar negeri negara; Dan [. . .] kami mengamati peningkatan langsung dalam jumlah (atau frekuensi) penggunaannya.' Sekali lagi, Diplomasi Kemanusiaan kemudian memberikan kerangka kerja bagi negara-negara seperti Turki untuk mengejar kebijakan kemanusiaan dan kebijakan luar negeri yang tampaknya bertentangan berdasarkan kepentingan militer, politik dan ekonomi.

Selain kemampuan, model Breuning juga berfokus pada kesempatan untuk bertindak, yang merupakan 'kemungkinan yang diberikan oleh keadaan' sebagai sumber konsepsi peran nasional. Konflik dan ketidakstabilan di Timur Tengah setelah pemberontakan Arab, khususnya perang saudara Suriah dan krisis pengungsi yang disebabkan, telah menjadi perkembangan yang berkontribusi pada peran Diplomasi Kemanusiaan Turki. Selain itu, perang saudara di Libya dan Yaman, ketidakstabilan di negara tetangga Irak, dan konflik yang berkelanjutan seperti di Afghanistan dan kelaparan di Somalia semuanya memberikan peluang untuk keterlibatan Ankara. Secara keseluruhan, ketidakstabilan di lingkungannya yang lebih luas telah memaksa Turki mengadopsi Diplomasi Kemanusiaan untuk membantu krisis kemanusiaan dan mencapai tujuan kebijakan luar negeri umum untuk mendukung stabilitas di sekitarnya.

Selain krisis individu dan ketidakstabilan di lingkungannya, persepsi Turki tentang tatanan internasional yang berubah memberikan peluang bagi negara-negara seperti Turki berperan dalam mengembangkan Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsepsi peran nasional. Ada persepsi di abad ke-21 bahwa politik global sekali lagi bergeser dan memungkinkan lebih banyak peluang bagi 'middle power' atau 'emerging power' untuk berperan. Turki tampaknya menjadi salah satu aktor ini dalam beberapa tahun terakhir yang sangat ingin mengambil kesempatan untuk mengambil tempatnya dalam tatanan internasional yang berkembang. Sangat menarik untuk mengamati perilaku serupa di 'negara berkembang' lainnya, seperti Cina, Brasil, dan India, yang semuanya telah meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, Diplomasi Kemanusiaan dipandang sebagai peluang untuk 'Turki yang bangkit' dalam tatanan internasional yang terus berubah. Bagi (Davutoğlu, 2013, p. 865), Diplomasi Kemanusiaan Turki merupakan 'adaptasi terhadap iklim internasional yang baru [. . .] yang muncul dari tekadnya untuk menjadi aktor aktif selama periode perubahan sejarah yang cepat ini.' Dengan demikian, pemerintah tampaknya menganggap Diplomasi Kemanusiaan sebagai simbol status yang menunjukkan aspirasi Turki dan posisi yang konon meningkat dalam tatanan internasional yang sedang bertransformasi. Penting untuk dicatat bahwa persepsi Turki tentang tatanan global yang berubah memerlukan transisi dari dunia unipolar ke multipolar dan 'pembubaran dunia yang berpusat pada Barat' (TİKA, 2017). Dengan demikian, pembingkai Diplomasi Kemanusiaan Turki mewakili pandangan dunianya dan ambisinya untuk merekonstruksi identitas global Turki dan posisinya sebagai pemimpin non-Barat yang sedang naik daun.

3. Peran Diplomasi Kemanusiaan: Menjembatani Kebijakan Luar Negeri dan Politik dalam Negeri

Politik dan retorika Diplomasi Kemanusiaan, selain membantu menempa identitas internasionalnya, membantu Turki dalam usahanya untuk membangun kembali identitas domestik Turki. Sepanjang masa pemerintahannya, elit politik mengklaim mewakili '*identitas sejati Turki*', *menekankan peradaban Islam dan masa lalu Ottoman*. Dibangun di atas gagasan zakat (praktik sedekah Islam), Diplomasi Kemanusiaan telah menjadi bagian penting dari identitas baru ini. Pada saat yang sama, Diplomasi Kemanusiaan telah digunakan untuk memperkuat '*modal sosial Islam*' (Çevik et al.,

2018, p. 176) sebagaimana Diplomasi Kemanusiaan sebagai kebijakan luar negeri telah memberdayakan NGOs Islam. Turki telah menyaksikan pertumbuhan aktivitas dan keterlibatan NGOs Islam dalam diplomasi kemanusiaan internasional (Turhan & Bahçecik, 2021) baik karena mereka menerima identitas kebijakan luar negeri atau hanya karena mereka mendukung kebijakan resmi Turki. Mereka bekerja erat di Diplomasi Kemanusiaan pada tanggap darurat kemanusiaan, khususnya di Afrika dan Timur Tengah (Laporan wawancara dari penelitian terdahulu dengan NGOs kemanusiaan, September-Desember 2014). NGOs aktif lainnya di Diplomasi Kemanusiaan Turki adalah Bulan Sabit Merah Turki (Kızılay), organisasi kemanusiaan terbesar Turki sejak zaman Ottoman. Kızılay, bagaimanapun, semakin dekat dengan pemerintah dan dengan demikian telah menjadi organisasi hibrida. Di bawah Turki, Kızılay telah menjadi sangat aktif secara internasional dan sekarang memiliki perwakilan tetap di Somalia, Irak, wilayah Palestina, dan Yaman (Middle East Monitor 13 Desember 2016). Dengan demikian, Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsepsi peran memungkinkan Turki untuk mengkonsolidasikan identitas domestiknya dan menata ulang hubungan negara-masyarakat dengan memberdayakan NGOs Islam dan menciptakan ruang bagi mereka dalam kebijakan luar negeri.

Selain NGOs, beberapa yayasan telah aktif secara internasional dan terlibat dalam Diplomasi Kemanusiaan dengan pemerintah. Yayasan-yayasan ini (vakıfs), meskipun independen dari negara di atas kertas, dalam praktiknya bekerja sangat erat dengan pemerintah Turki. Yayasan Diyanet Turki, didirikan pada tahun 1975, memiliki hubungan organik dengan Direktorat Urusan Agama resmi Turki (Diyanet) dan aktif di lebih dari 140 negara (Çitak et al., 2020, p. 175). Selain memberikan bantuan kemanusiaan, pihaknya juga memberikan beasiswa dan pelatihan keagamaan di beberapa negara. Demikian pula, Yayasan Maarif yang baru didirikan aktif dalam bidang pendidikan di 67 negara, termasuk Afghanistan dengan 49 sekolah dan 12 asrama, Irak dengan 12 sekolah, dan Somalia dengan tujuh sekolah dan tiga asrama. Dengan demikian, Diplomasi Kemanusiaan telah menciptakan ruang aktivisme dan legitimasi aktor-aktor Islam dalam kebijakan luar negeri sekaligus memperkuat mereka di ruang publik.

Akibatnya, bagaimana elit politik Turki mengonsep dan mengimplementasikan Diplomasi Kemanusiaan Turki menjadi bagian dari kontestasi dan politik dalam negeri. Aspek paling kontroversial dari Diplomasi Kemanusiaan Turki dalam hal ini adalah kasus Suriah, karena, melalui masuknya pengungsi ke Turki, masalah tersebut telah menjadi bagian dari debat domestik. Meskipun Turki telah menangani masuknya pengungsi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif baik, topik tersebut semakin menjadi titik kritik terhadap pemerintah. Jadi, ini digunakan oleh beberapa partai oposisi dari waktu ke waktu. Diplomasi Kemanusiaan kemudian juga menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk menangkis kritik tersebut. Bahkan selama tahun pertama krisis Suriah, ketika jumlah pengungsi masih relatif rendah, Davutoğlu menanggapi kritik dengan memasukkan masalah tersebut sebagai bagian dari Diplomasi Kemanusiaan Turki (Middle East Monitor, 13 Desember 2016).

4. Kinerja Peran: Diplomasi Kemanusiaan dalam Aksi

Afghanistan dan Somalia menonjol sebagai dua negara di mana kelengkapan Diplomasi Kemanusiaan Turki dapat diamati sepenuhnya. Sekilas, kedua konteks itu berbeda secara signifikan. Keterlibatan Turki di Afghanistan dimulai dalam konteks operasi NATO pimpinan AS di negara itu setelah 9/11, sebelum pengadopsian Diplomasi Kemanusiaan sebagai konsepsi peran. Kegiatan Turki di sana berlangsung dalam kerangka intervensi multilateral. Di sisi lain, Diplomasi Kemanusiaan Turki di Somalia dimulai pada 2011 dan merupakan keterlibatan bilateral. Namun, selama bertahun-tahun, keterlibatan Turki dengan Afghanistan juga menjadi lebih independen (Sey dan Seufert 2016) dan unilateral karena semakin masuk dalam kerangka Diplomasi Kemanusiaan.

Dalam kedua kasus tersebut, Turki terlibat dalam proses pembangunan negara dan, dengan demikian, terlibat dalam Diplomasi Kemanusiaan yang multidimensi.

Baik di Afghanistan maupun Somalia, di mana Turki tidak berbagi perbatasan darat atau laut, Turki telah banyak memanfaatkan bingkai kedekatan budaya. Hal ini tidak mengherankan karena terlepas dari wacana pemerintah dan LSM, yang mengklaim bahwa mereka memberikan bantuan kemanusiaan terlepas dari identitas penerima, analisis Diplomasi Kemanusiaan Turki, secara umum, menunjukkan pentingnya ikatan budaya, sejarah, dan geografis dalam hal penerima manfaat utama (Kavaklı 2018). Kedekatan sejarah dan budaya telah digunakan untuk membenarkan konsepsi peran HD Turki terhadap negara-negara tersebut dan keterlibatannya di tempat-tempat yang relatif jauh tersebut.

Dalam mendefinisikan konsepsi peran Diplomasi Kemanusiaan, Turki mengacu pada basis ideasionalnya. Pembingkaiannya seperti itu melayani beberapa tujuan. Di satu sisi, hal ini membenarkan keterlibatan Turki dengan aktor domestik dan internasional. Di sisi lain, menempatkan Turki sebagai pemegang identitas welas asih di dunia Islam. Presiden Erdoğan, saat berbicara kepada aktor eksternal dan domestik, merujuk Islam dan solidaritas Islam dalam membangun konsepsi peran Diplomasi Kemanusiaan Turki. Dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul di Somalia dan konferensi pers setelah kembali dari kunjungan pertamanya ke Mogadishu, Erdogan merujuk pada Al-Qur'an (5:32) dan Sunnah untuk membenarkan bantuan Turki dan mendorong anggota lain untuk melakukan hal yang sama (Erdoğan 2019, 3003–309, 317–318, 321). Demikian pula, Erdoğan mengutip apa yang dia sebut sebagai upaya intens Turki untuk membawa perdamaian ke Afghanistan mengacu pada Hadits yang mengatakan, 'Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya [. . .] Siapa pun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya' (Erdogan 2019, 321).

Ada proses yang saling menguatkan di sini. Di satu sisi, elit politik lain Turki, sejalan dengan konsepsi Diplomasi Kemanusiaannya, lebih memilih untuk terlibat di negara-negara yang dianggap memiliki hubungan sejarah dan budaya. Di sisi lain, kedekatan budaya juga memungkinkan Turki masuk ke beberapa negara yang terkena dampak konflik. Hal ini terlihat dari karakterisasi Turki oleh pejabat negara penerima yang juga menekankan kedekatan budaya dengan Turki. Misalnya, dalam kasus Afghanistan, pentingnya sejarah panjang ikatan dan kesamaan budaya cukup sering ditekankan oleh para aktor Afghanistan. Demikian pula, pejabat Somalia sering merujuk pada kedekatan budaya dengan Turki (Wasuge 2016, 26). Dengan demikian, karakterisasi peran Turki terkadang tercermin dalam ekspektasi peran.

Analisis lain lagi terhadap Diplomasi Kemanusiaan Turki juga mengungkapkan bahwa, dalam beberapa kasus, di negara-negara penerima, Turki tampaknya telah mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan beberapa kelompok. Hal ini terjadi di Afghanistan, negara dengan identitas multietnis sebagai tujuan Diplomasi Kemanusiaan Turki, selain karakter umumnya, juga lebih fokus pada kelompok Turki seperti Uzbek dan Turkmen. Selain ibu kota Kabul, tempat bantuan utama Turki dipusatkan, Turki juga berfokus pada wilayah Barat Laut, yang selama bertahun-tahun dikendalikan oleh Jenderal Dostum, seorang panglima perang berlatar belakang Uzbekistan yang menjabat sebagai wakil presiden antara 2014 dan 2020, dan yang telah berhubungan dekat dengan Turki.

Dengan bantuan pembangunan sebesar 1,8 miliar USD pada tahun 2021 dan sekitar 13.000 proyek bantuan pembangunan, Afghanistan telah menjadi program pembangunan terbesar Turki di luar negeri. Dukungan tersebut terutama difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pada tahun-tahun awal keterlibatannya, Turki mulai menjalankan Tim Rekonstruksi Provinsi (PRT) di provinsi Wardak dan Jawzjan dan untuk membedakan dirinya dari yang lain dengan menjadi satu-satunya PRT yang dijalankan oleh diplomat sipil dan bukan personel militer (Kaya 2013, 24). Dalam

mengembangkan kapasitas di bidang kesehatan, pada tahun 2011, 'Departemen Kesehatan kedua negara sepakat untuk melatih dokter, perawat dan bidan Afghanistan, dan pejabat medis lainnya di sekolah kedokteran Turki dalam program mulai dari tiga bulan hingga satu tahun' (Kaya 2013, 27). Selama bertahun-tahun, Turki telah memberikan layanan kesehatan kepada sembilan juta orang. Afghanistan juga menjadi salah satu negara yang Turki tawarkan bantuan Covid-19 (Anadolu Agency 11 Juni 2020). Sebagai bagian dari Diplomasi Kemanusiaan Turki, lebih dari 100 sekolah telah dibangun, dan konstruksi berlanjut di universitas wanita Turki-Afghanistan. Yayasan Maarif juga aktif di Afghanistan dan telah memberikan pendidikan kepada 6000 siswa di 45 sekolah. Lebih dari 4000 pelajar Afghanistan telah menerima manfaat dari beasiswa Turki.

Selain itu, Turki telah memberikan pelatihan kepada militer dan polisi Afghanistan baik di Turki maupun di Afghanistan sebagai bagian dari proses pembangunan negara. Turki telah memediasi beberapa kali, menjadi tuan rumah delapan pertemuan antara Afghanistan dan Pakistan; ini telah dianggap penting untuk stabilitas kedua negara. Diplomasi Kemanusiaan Turki juga memasukkan tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara. Pejabat Turki telah secara terbuka menyatakan bahwa 'Turki menganggap Afghanistan sebagai mitra berharga dalam perdagangan dan investasi,' terutama dalam energi, pertambangan, transportasi, dan konektivitas regional. Pada tahun 2012 kedua negara menandatangani Kesepakatan Kemitraan Strategis, dan Turki menyatakan rencananya untuk tetap tinggal terlibat setelah penarikan NATO. Faktanya, setelah Taliban mengambil alih dan menarik pasukan AS dan NATO lainnya, termasuk Turki, pada tahun 2021, pemerintah Turki telah berusaha mendapatkan pijakan di Afghanistan, terutama dengan mencoba membantu menjalankan bandara Kabul. Secara paralel, Diplomasi Kemanusiaan kembali digunakan sebagai titik masuk ke Afghanistan. Presiden Erdoğan, merujuk pada krisis kemanusiaan yang semakin dalam di negara tersebut, seraya menyatakan bahwa Turki akan terus memenuhi kewajiban persaudaraannya terhadap rakyat Afghanistan (Harian Sabah 12 Oktober 2021). Akibatnya, delegasi Afghanistan yang dipimpin oleh penjabat menteri luar negeri mengunjungi Turki untuk mengadakan pembicaraan dengan menteri luar negeri dan dua organisasi bantuan Turki, AFAD dan TİKA, dan Direktorat Urusan Agama, Diyanet (Harian Sabah 14 Oktober 2021).

Di Somalia, di sisi lain, Turki bertindak secara bilateral, memulai upaya Diplomasi Kemanusiaan komprehensif yang dipublikasikan secara luas, yang ditampilkan sebagai model. Setelah kunjungan Perdana Menteri Erdoğan, Turki menyediakan 15 ribu ton makanan dan obat-obatan pada tahap pertama. Segera setelah itu, TİKA mendirikan kantor di Mogadishu dan mulai mengoordinasikan proyek, terutama di bidang infrastruktur, kotamadya, pendidikan, dan kesehatan. Lebih dari 1000 siswa Somalia telah menerima Beasiswa Turki. Secara keseluruhan, bantuan kemanusiaan dan teknis Turki ke Somalia melebihi 1 miliar USD. Sementara itu, Turkish Airlines memulai penerbangan komersial. Turki pertama kali membuka kembali kedutaannya di Mogadishu pada November 2011. Kemudian pada 2014, konsulat jenderal di Hargeisa hadir di lapangan (situs web Kementerian Luar Negeri Turki).

Sebagai bagian dari Diplomasi Kemanusiaan di Somalia, Turki juga terlibat dalam fasilitasi dan mediasi dengan menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang Somalia pada tahun 2010, 2012, dan 2015 dan menjadi tuan rumah Forum Kemitraan Tingkat Tinggi pada bulan Februari 2016 (situs web Kementerian Luar Negeri Turki). Turki menunjuk utusan khusus pada 2018 untuk menengahi antara Mogadishu dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri. Pada 30 September 2017, Turki membuka akademi pelatihan militer luar negeri terbesarnya, Pusat Pelatihan Militer Turki, di Mogadishu. Akibatnya, melalui pelatihan yang diadakan di Turki dan Somalia, Turki telah 'melatih hampir 1.500 tentara Somalia dari 10.000 komitmennya' pada tahun 2020 sementara pada saat yang sama 'membangun dan melatih angkatan udara negara'

(Shajkovci et al. 2020). Pada 2018, Turki dan Somalia menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi. Akibatnya, impor Turki meningkat, melonjak lebih dari delapan kali lipat pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya dan terus meningkat secara stabil setiap tahun, akhirnya mencapai 242 juta USD pada tahun 2019 (database DataTurkey). Didorong oleh pemerintah Turki, perusahaan Turki membangun dan mengoperasikan pelabuhan udara dan laut di Mogadishu. Turki berkontribusi pada pengurangan utang Somalia dengan menjaminkan sekitar 2,4 juta dalam Special Drawing Rights (SDR), mata uang cadangan IMF (Anadolu Agency 6 November 2020). Pada tahun 2020, Erdogan mengumumkan bahwa Somalia telah mengundang Turki untuk mengeksplorasi minyak lepas pantai (Reuters 20 Januari 2020).

Hubungan antara paham kemanusiaan dan kepentingan negara-negara donor sudah cukup mapan dalam literatur. Keberadaan hubungan semacam itu telah diperdebatkan baik untuk donor tradisional (Meernick et al. 1998) maupun donor baru (Binder dan Meier 2011). Konsep Diplomasi Kemanusiaan, yang melampaui bantuan kemanusiaan darurat, memiliki kemungkinan besar untuk memasukkan kepentingan semacam itu. Jadi, seperti klaim Breuning (1995, 235), dikotomi 'kepentingan donor versus kebutuhan penerima' mungkin sederhana. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan di atas, narasi Turki tentang Diplomasi Kemanusiaan melibatkan penggabungan motif kemanusiaan dengan kepentingan, meskipun didefinisikan sebagai kepentingan bersama (Laporan Wawancara pejabat TİKA, 28 Agustus 2013; Percakapan dengan pejabat AFAD, 9 Desember 2017). Dibangun dari perspektif Turki, kepentingan ekonomi dan komersial, pencapaian kekuatan dan pengaruh global dan regional, dan tujuan yang lebih umum seperti mendukung stabilitas regional tidak serta merta bertentangan atau melemahkan tujuan kemanusiaan. Karena Diplomasi Kemanusiaan lebih dari kemanusiaan dan membutuhkan komitmen dan keterlibatan yang lebih komprehensif dan jangka panjang, kepentingan strategis, politik dan ekonomi umumnya muncul. Klaim Turki di sini adalah bahwa tujuan tersebut juga menguntungkan negara penerima dan sejalan dengan kepentingan Turki.

Analisis Diplomasi Kemanusiaan Turki di wilayah konflik justru menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan luar negeri Turki. Misalnya, Diplomasi Kemanusiaan Turki di Somalia muncul dalam konteks umum keterlibatan Ankara dengan Afrika, yang dimulai pada akhir 1990-an dan dipercepat pada 2000-an (Özkan 2010). Demikian pula, Turki telah lama memiliki kepentingan di Afghanistan. Selain sejarah panjang hubungan antara kedua negara dan kehadiran lama Turki di sana sebagai bagian dari kekuatan internasional, pemerintah Turki semakin tertarik pada Afghanistan, terutama sumber minyak dan gasnya dan kepentingannya dalam peraturan transportasi lintas wilayah sejak 2010-an (Sey dan Seufert 2016, 2). Dalam hal ini, Diplomasi Kemanusiaan telah memberikan peluang akses dan kemungkinan untuk menciptakan ikatan politik baru dan mengkonsolidasikan hubungan yang ada. Lebih lanjut, Turki sejak awal sudah jelas tentang tujuan peningkatan hubungan politik, ekonomi, dan militer tergantung pada peluang. Namun, semua ini dibingkai sebagai 'kemitraan yang setara' dan 'saling menguntungkan'. Konsepsi peran Diplomasi Kemanusiaan memungkinkan pembingkai ini menjadi mungkin (Sucuoğlu dan Sazak, 2016).

Namun, kinerja peran Diplomasi Kemanusiaan Turki kadang-kadang menyebabkan konflik intra-peran karena menjadi sulit untuk mencapai kemanusiaan dan kepentingan pada saat yang bersamaan. Ini terjadi ketika peran Turki sebagai aktor kemanusiaan dan aktor eksternal yang mengejar kepentingannya dengan mengembangkan hubungan ekonomi dan militer tampak berbenturan dalam beberapa kasus. Persepsi peran Turki seperti itu telah mempengaruhi ekspektasi (alter ego) di antara para aktor di negara-negara tersebut. Dalam hal ini, Turki menghadapi bahaya terseret ke dalam persaingan dan konflik domestik. Turki telah melibatkan aktor lokal, tokoh masyarakat, penerima manfaat, dan aktor politik sebagai bagian dari Diplomasi Kemanusiaannya. Dengan demikian, pemerintah Turki telah berupaya keras untuk menggambarkan dirinya sebagai 'donor yang apolitis dan tidak memihak' (Tank 2013). Namun, proses pembangunan

negara pasca-konflik lebih rumit, karena negara donor pasti dianggap sebagai pihak dalam perebutan kekuasaan dalam negeri. Ini terjadi dalam kasus Somalia beberapa kali. Pelatihan militer Somalia oleh Turki dan melengkapinya dengan peralatan militer dapat dianggap penting untuk mengkonsolidasikan negara di negara yang selama bertahun-tahun tidak ada dan berperang melawan kelompok teroris seperti al Shabab. Ini berarti al Shabab mulai menargetkan warga sipil Somalia dan pekerja bantuan Turki, dokter, insinyur, dan fasilitas. Misalnya, pada 2013, al Shabab menyerang kedutaan Turki, menewaskan tiga orang dan melukai sembilan lainnya. Pada Mei 2019, mereka mengaku bertanggung jawab atas bom mobil yang menewaskan seorang insinyur konstruksi Turki yang bekerja di fasilitas pelatihan militer Turki di Mogadishu (New York Times, 22 Juli 2019). Secara lebih luas, ada kesulitan dalam mempertahankan ketidakberpihakan. Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas, dukungan militer Turki juga menarik perhatian oposisi politik ketika pemerintah menindas mereka yang berdemonstrasi menentang penundaan pemilu. Para pemimpin oposisi mengirimkan petisi ke kedutaan Turki di Mogadishu mendesak Turki untuk tidak mengirim pengiriman persenjataan yang direncanakan (Reuters 16 Desember 2020). Turki menanggapi dengan mengundang 'Pemerintah Federal dan Negara Anggota Federal untuk bersatu dan menyelesaikan perselisihan dengan dialog yang inklusif dan konstruktif berdasarkan konsensus yang dicapai pada 17 September 2020' dan menekankan 'pentingnya mengadakan pemilihan tanpa penundaan lebih lanjut' (Turki Kementerian Luar Negeri 24 Maret 2021).

Sementara itu, duta besar Turki di Mogadishu bekerja sama untuk menengahi para pihak guna mencari jalan keluar dari kebuntuan politik (Anadolu Agency 24 Maret 2021). Namun, presiden Somalia mengumumkan pada April 2021 bahwa dia akan memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun. Kisah di Somalia ini menunjukkan bahwa mempertahankan ketidakberpihakan dan netralitas mungkin lebih menantang. Hal ini juga menunjukkan bahwa sifat ekstensif Diplomasi Kemanusiaan memerlukan keterlibatan yang lebih dalam dengan negara dan negaranya, yang menciptakan ketegangan dan ambiguitas. Meningkatnya keterlibatan strategis, politik, dan ekonomi Turki juga mempersulit rekonsiliasi antara kepentingan kemanusiaan penerima dengan kepentingan Turki. Pada saat yang sama, hal ini dapat menyebabkan konflik dengan pernyataan kognitif dan kepentingan materialnya. Semua ini menunjukkan konflik peran.

Ketegangan antara kemanusiaan dan diplomasi juga terlihat jelas bahwa Diplomasi Kemanusiaan Turki membawa bahaya mengubah negara-negara yang terkena dampak konflik ini menjadi arena persaingan di antara kekuatan-kekuatan regional. Karena Diplomasi Kemanusiaan melampaui kemanusiaan dan melibatkan keterlibatan yang komprehensif dan berkelanjutan, hal ini mengandung bahaya terlibat dalam persaingan regional. Menjadi bagian dari persaingan regional dapat memperburuk ketegangan yang ada di negara-negara yang sudah rentan dan tidak stabil ini. Hal ini telah terjadi sampai batas tertentu di Somalia, sebuah negara yang terletak strategis di Tanduk Afrika, menguasai Selat Bab al-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudera Hindia (New York Times 22 Juli 2019). Meningkatnya pengaruh Turki, serta Qatar, di Somalia menarik UEA, yang mengancam stabilitas dengan mendukung negara Somaliland yang memisahkan diri.

Di sisi lain, Diplomasi Kemanusiaan Turki di Afghanistan, seperti yang terjadi dalam konteks keterlibatan multilateral, paling tidak kontroversial dalam hal ini. Pemerintah Turki di satu sisi menggunakan payung NATO untuk melanjutkan kehadirannya di sana. Sebagai bagian dari yang pertama, ia mengembangkan hubungan dekat dengan beberapa aktor, seperti panglima perang Jenderal Dostum yang kemudian menjadi wakil presiden dan mendukung proses pembangunan negara dan pemerintahan baru. Kunjungan Presiden Erdoğan ke Kabul setelah pemilihan presiden yang kontroversial di sana pada tahun 2014 menandai dimulainya era baru ini. Jadi, sepertinya Turki mengelola ketegangan yang melekat dalam konsepsi peran Diplomasi Kemanusiaannya. Namun, pengambilalihan Taliban dan penarikan pasukan NATO telah menantang posisi Turki.

Turki telah mencoba menyesuaikan diri dengan realitas baru dan bahkan bertujuan untuk mengubahnya menjadi peluang baru. Klaim Erdoğan tentang Islam sebagai landasan bersama antara Turki dan Taliban dan tanggapan Turki terhadap kebutuhan bantuan kemanusiaan Taliban, meskipun terbatas karena krisis ekonomi di Turki, dapat dianggap sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini. Menanggapi krisis kemanusiaan yang memburuk di negara itu, Turki mengirimkan tiga putaran bantuan dengan 'kereta kebaikan' pada bulan Januari, Februari dan Maret 2022 (Harian Sabah 15 Maret 2022). Operasi yang diselenggarakan oleh AFAD dan dilaksanakan dengan partisipasi 11 organisasi kemanusiaan ini menjadi contoh lain kerjasama negara-LSM di Diplomasi Kemanusiaan. Sementara itu, Turki terus berupaya untuk bertanggung jawab atas keamanan bandara Kabul bersama dengan Qatar. Apakah Turki akan dapat menciptakan pengaruh strategis di Afghanistan dan menjadikannya bagian dari Diplomasi Kemanusiaannya dengan keterlibatan komprehensif masih harus dilihat.

E. PENUTUP

Turki mengadopsi Diplomasi Kemanusiaan sebagai elemen utama dalam kebijakan luar negerinya karena beberapa alasan strategis. Pertama, Turki memanfaatkan diplomasi ini untuk membangun citra internasional yang positif sebagai negara yang peduli terhadap kemanusiaan dan kontributor aktif dalam menangani konflik dan krisis di berbagai negara, seperti Afghanistan dan Somalia. Kedua, dengan menggunakan narasi budaya dan sejarahnya, Turki mencoba membedakan dirinya dari donor-donor tradisional Barat, menawarkan pendekatan yang lebih dekat dan berdasarkan keterikatan budaya. Ketiga, Diplomasi Kemanusiaan memberikan Turki platform untuk mengkonsolidasikan identitas domestiknya dengan menunjukkan bahwa negara ini adalah 'kekuatan yang bangkit' yang berperan dalam isu-isu global. Dengan demikian, diplomasi ini tidak hanya memenuhi tujuan kemanusiaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun dan memperkuat citra serta pengaruh Turki di tingkat internasional.

Meskipun Turki menggunakan Diplomasi Kemanusiaan untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, pendekatannya tidak selalu konsisten atau tanpa kontradiksi. Pertama, Turki sering kali mencampurkan tujuan kemanusiaan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan militer, membingungkan garis antara upaya kemanusiaan murni dan keuntungan nasionalnya sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi integritas dan efektivitas upaya kemanusiaan. Kedua, dalam praktiknya, Turki terkadang menunjukkan tindakan yang lebih intervensionis dan menggunakan kekuatan keras untuk mencapai tujuan-tujuan diplomasi kemanusiaannya, yang bertentangan dengan pendekatan 'kekuatan lunak' yang sering dikaitkan dengan diplomasi kemanusiaan. Ketidakjelasan ini mencerminkan tantangan nyata dalam mencapai keseimbangan antara mempromosikan kepentingan nasional dan memenuhi komitmen kemanusiaan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akpınar, P. (2013). Turkey's Peacebuilding in Somalia: The Limits of Humanitarian Diplomacy. *Turkish Studies*, 14(4), 735–757.
<https://doi.org/10.1080/14683849.2013.863448>
- Altunışık, M. B. (2014). Turkey as an 'emerging donor' and the Arab uprisings. *Mediterranean Politics*, 19(3), 333–350.
<https://doi.org/10.1080/13629395.2014.959761>

- Altunışık, M. B. (2020). The new turn in Turkey's foreign policy in the Middle East: Regional and domestic insecurities. *Istituto Affari Internazionali*.
<https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep29462.pdf>
- Aras, B., & Gorener, A. (2010). National role conceptions and foreign policy orientation: The ideational bases of the Justice and Development Party's foreign policy activism in the Middle East. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 12(1), 73–92. <https://doi.org/10.1080/19448950903507453>
- Bevir, M., Daddow, O., & Hall, I. (2013). Introduction: interpreting British foreign policy. *The British Journal of Politics and International Relations*, 15(2), 163–174. <https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2012.00537.x>
- Breuning, M. (1995). Words and deeds: Foreign assistance rhetoric and policy behavior in the Netherlands, Belgium, and the United Kingdom. *International Studies Quarterly*, 39(2), 235–254. <https://academic.oup.com/isq/article-abstract/39/2/235/1820119>
- Breuning, M. (2011). Role theory research in international relations: state of the art and blind spots. *Role Theory in International Relations*, 16–35.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203818756-4/role-theory-research-international-relations-marijke-breuning>
- Brown, C., & Ainley, K. (2005). *Understanding International Relations, Third Edition* (Third).
- Cantir, C., & Kaarbo, J. (2016). *Domestic role contestation, foreign policy, and international relations*.
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=UAATDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Cantir,+C.,+and+J.+Kaarbo,+2016.+Domestic+role+contestation,+foreign+policy,+and+international+relations.+Oxford:+Oxford+University+Press.&ots=visrxv-3ye&sig=KeAFzI9ipfjRXE4hfQqo531W0jE>
- Çevik, S., Sevin, E., & Baybars-Hawks, B. (2018). State–Civil Society Partnerships in International Aid and Public Diplomacy: The Case of Turkey and Somalia. *Communicating National Image through Development and Diplomacy: The Politics of Foreign Aid*, 169–192. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76759-8_8
- Çitak, Z., Bedirhanolu, P., & Dölek, Ç. (2020). The Transformation of the State–Religion Relationship Under the AKP: The Case of the Diyanet. *Turkey's New State in the Making: Transformations in Legality, Economy and Coercion*.
<https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=cPL2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT214&dq=%C3%87itak,+Z.+2020.+The+transformation+of+the+state-religion+relationship+under+the+AKP:+The+case+of+diyanet.+In+Turkey%E2%80%99s+new+state+in+the+making+,+eds.+P.+Bedirhanoglu,+et.al.,+167%E>

2%80%9387.+London:+Zed+books.&ots=6-6v6b7PGl&sig=emnE-fzTApPz3HCnN2938ee07M0

- Daily Sabah. (2021). *Turkey's foreign policy "enterprising and humanitarian": FM*.
<https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-foreign-policy-enterprising-and-humanitarian-fm>
- Dal, E. P., & Erşen, E. (2014). Reassessing the "Turkish Model" in the Post-Cold War Era: A Role Theory Perspective. *Turkish Studies*, 15(2), 258–282.
<https://doi.org/10.1080/14683849.2014.926238>
- Davutoğlu, A. (2013). Turkey's humanitarian diplomacy: objectives, challenges and prospects. *Nationalities Papers*, 41(6), 865–870.
<https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/turkeys-humanitarian-diplomacy-objectives-challenges-and-prospects/9945F3FA36B4C24F9ACD902B8E5F56B1>
- De Lauri, A. (2018). Humanitarian diplomacy: A new research agenda. *CMI Brief*, 4.
<https://www.cmi.no/publications/6536-humanitarian-diplomacy-a-new-research-agenda>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1995). Transforming Qualitative Research Methods: Is It a Revolution? *Journal of Contemporary Ethnography*, 24(3), 349–358.
<https://doi.org/10.1177/089124195024003006>
- Donelli, F. (2017). Features, Aims and Limits of Turkey's Humanitarian Diplomacy. *Central European Journal of International & Security Studies*, 11(3).
https://cejiss.org/images/issue_articles/2017-volume-11-issue-3/59-cejiss-cejiss-0317-electronic.pdf
- Harnisch, S. (2011). Role theory: operationalization of key concepts. *In Role Theory in International Relations*, 7–15.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203818756-3/role-theory-sebastian-harnisch>
- Harroff-Tavel, M. (2005). THE HUMANITARIAN DIPLOMACY OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. *N Relations Internationales*, 121, 72–89.
- Hatipoglu, E., & Palmer, G. (2016). Contextualizing change in Turkish foreign policy: the promise of the 'two-good' theory. *Cambridge Review of International Affairs*, 29(1), 231–250. <https://doi.org/10.1080/09557571.2014.888538>
- Holsti, K. J. (1970). National role conceptions in the study of foreign policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233–309.
<https://www.jstor.org/stable/3013584>

- Kavakli, K. (2018). Domestic Politics and the Motives of Emerging Donors: Evidence from Turkish Foreign Aid. *Political Research Quarterly*, 71(3), 614–627. <https://www.jstor.org/stable/45106686>
- Langan, M. (2017). Virtuous power Turkey in sub-Saharan Africa: the ‘Neo-Ottoman’ challenge to the European Union. *Third World Quarterly*, 38(6), 1399–1414. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1229569>
- Lauri, A. De. (2016a). *The politics of humanitarianism. Power, ideology and aid*. <http://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2475398?locale-attribute=en>
- Lauri, A. De. (2016b). The politics of humanitarianism. Power, ideology and aid. *IB Tauris*. <http://open.cmi.no/cmi-xmlui/handle/11250/2475398?locale-attribute=en>
- Malici, A., & Walker, S. (2016). *Role theory and role conflict in US-Iran relations: Enemies of our own making*. Taylor & Francis. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=YiAlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Malici,+A.,+and+S.G.+Walker.+2016.+Role+theory+and+role+conflict+in+U.S.-Iran+relations.+&ots=xg5VFe5Ggc&sig=kmqjj9bcps0q0Sq43GW1Ps11hds>
- Minear, L., Smith, H., & University, U. (2007). Humanitarian diplomacy :: practitioners and their craft /: edited by Larry Minear and Hazel Smith. *UN Library*. <https://digitallibrary.un.org/record/602125>
- OCHA. (2013, September 26). *UN General Assembly: Turkey announced as host of 2016 World Humanitarian Summit*. <https://www.unocha.org/story/un-general-assembly-turkey-announced-host-2016-world-humanitarian-summit>
- OHCHR. (2021, August 28). *OHCHR and protecting human rights in humanitarian crises* | OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/humanitarian-crises>
- OVAH, Şevket. (2013). Decoding Turkey’s Lust for Regional Clout in the Middle East: A Role Theory Perspective. *Journal of International and Area Studies*, 20(1), 1–21. <https://www.jstor.org/stable/43111512>
- Özdamar, Ö. (2016). Domestic sources of changing Turkish foreign policy toward the MENA during the 2010s: A role theoretic approach. *Domestic Role Contestation, Foreign Policy, and International Relations*, 105–120. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315623580-11/domestic-sources-changing-turkish-foreign-policy-toward-mena-2010s-role-theoretic-approach-%C3%B6zg%C3%BCr-%C3%B6zdamar>
- Özdamar, Ö. , Halistoprak, B. T. , & Sula, İ. E. (2014). From good neighbor to model: Turkey’s changing roles in the Middle East in the aftermath of the Arab Spring. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 11(42), 93–113. <https://dergipark.org.tr/en/pub/uidergisi/article/553302>

- Rachmawati, M. (n.d.). The Development of Online Platform for Humanitarian Logistics. *Journal.Oscm-Forum.Org*. Retrieved September 20, 2023, from https://www.journal.oscm-forum.org/journal/proceeding/download_paper/20191207221150_OSCM_2019_paper_176.pdf
- Rahmawati, R., Nur, P., F, A., Maulana, M. I., Heriansyah, H., & Andrianto, I. (2021). HAK ASASI MANUSIA DAN DIPLOMASI KEMANUSIAAN: Human Rights and Humanitarian Diplomacy. *Global Mind*, 3(1), 50–69. <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/globalmind/article/view/219>
- Régnier, P. (2011). The emerging concept of humanitarian diplomacy: identification of a community of practice and prospects for international recognition. *International Review of the Red Cross*, 93(884), 1211–1237. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/emerging-concept-of-humanitarian-diplomacy-identification-of-a-community-of-practice-and-prospects-for-international-recognition/6A3BEC19AF1EE554C9EDA7DCC8E8CCEB>
- Roberts, A. (1999). The role of humanitarian issues in international politics in the 1990s. *International Review of the Red Cross*, 81(833), 19–43. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/role-of-humanitarian-issues-in-international-politics-in-the-1990s/0852E9EF2DB7DBC46B2AEF39C2574ADB>
- Tepeciklioğlu, E., & Tepeciklioğlu, A. (2021). Turkey in Africa: A new emerging power? *Routledge*. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=P_guEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Eyryce+Tepeciklio%C4%9Flu,+E.,+and+A.O.+Tepeciklio%C4%9Flu,+eds.+2021.+Turkey+in+Africa:+A+new+emerging++power%3F,+London:+Routledge.&ots=Q1jarq_CRh&sig=TyZxaJuQUHC6UGXTsiBjUW03Hiw
- Thies, C. G. (2017). Role theory and Foreign Policy Analysis in Latin America. *Foreign Policy Analysis*, 13(3), 662–681. <https://doi.org/10.1111/FPA.12072/18086635/FPA.12072.PDF>
- TİKA. (2017). *Turkish Development Assistance Report 2017*. <https://www.tika.gov.tr/upload/2019/Turkish%20Development%20Assistance%20Report%202017/Kalkinma2017EngWeb.pdf>
- TİKA. (2019). *TURKISH DEVELOPMENT ASSISTANCE REPORT*. <https://www.tika.gov.tr/upload/sayfa/publication/2019/TurkiyeKalkinma2019WebENG.pdf>

- Turhan, Y., & Bahçecik, Ş. O. (2021). The agency of faith-based NGOs in Turkish humanitarian aid policy and practice. *Turkish Studies*, 22(1), 141–159.
<https://doi.org/10.1080/14683849.2020.1756786>
- Turunen, S. (2022). Humanitarian Diplomacy at the United Nations. *CMI*.
- Wehner, L. E. (2020). The narration of roles in foreign policy analysis. *Journal of International Relations and Development*, 23(2), 359–384.
<https://doi.org/10.1057/S41268-018-0148-Y>